

Relasi Kuasa Negara-Agama dan Produksi Otoritas Keagamaan di Turki: Dari Kemalisme hingga AKP

Ardi Kurniawan¹, Darwis Hude², Nur Rofiah³, Nurul Qomarudin⁴

Universitas PTIQ Jakarta^{1,2,3,4}

Corresponding email: ardyealkhadafi36@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 07-07-2026

Received : 08-07-2026

Revised : 27-07-2026

Accepted : 28-07-2026

Keywords

Turkey;

State-Controlled Secularism;

Diyanet;

Power Relations;

Governmentality

DOI:

10.59066/ijoms.v5i2.2692

ABSTRACT

Turkey represents a distinctive model of state-controlled secularism, in which religion is not institutionally separated from the state but is administered through the Diyanet İşleri Başkanlığı (Presidency of Religious Affairs). This study examines how state–religion power relations have shaped religious authority, socio-religious practices, and patterns of resistance from the Kemalist period to the Justice and Development Party (AKP) era. Employing a qualitative library research design, this study analyzes a purposively selected corpus of state policy documents, official Diyanet publications, peer-reviewed journal articles, scholarly books, and historical studies published primarily between 2011 and 2025, supplemented by seminal theoretical works. The data were examined using qualitative content analysis and interpreted through Michel Foucault's concepts of power, governmentality, and pastoral power. The findings indicate that state control over religious institutions encouraged the standardization of Sunni religious authority through Diyanet while limiting the institutional recognition of non-mainstream religious communities, particularly the Alevi community and several Sufi orders. The study further demonstrates that the transition from the secular-Kemalist establishment to the AKP government did not diminish state intervention in religious affairs but rather reoriented Diyanet from safeguarding republican secularism toward expanding Islamic-conservative religious discourse in the public sphere, thereby generating new forms of negotiation and resistance among secular and minority religious groups. This article contributes to the literature by offering a Foucauldian interpretation of Turkish secularism as a dynamic form of state-managed religious governance, highlighting the continuity and transformation of state power across different political regimes rather than a simple transition from secularism to religiosity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Hubungan antara negara dan agama merupakan salah satu isu paling dinamis dalam kajian politik, hukum, dan studi agama kontemporer. Berbagai negara mengembangkan model hubungan yang berbeda-beda, mulai dari pemisahan institusional yang tegas hingga keterlibatan aktif negara dalam mengatur kehidupan keagamaan. Perbedaan tersebut

menunjukkan bahwa sekularisme tidak memiliki bentuk tunggal, tetapi selalu dibentuk oleh konteks sejarah, politik, dan sosial masing-masing negara (Casanova, 1994; Kuru, 2009). Dalam konteks ini, Turki menempati posisi yang unik karena menerapkan state-controlled secularism, yakni model sekularisme yang tidak memisahkan agama dari negara, tetapi mengelolanya melalui birokrasi negara.

Keunikan tersebut menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, Republik Turki dibangun di atas proyek sekularisasi yang bertujuan menghapus dominasi institusi keagamaan dalam politik. Di sisi lain, negara justru membentuk Diyanet İşleri Başkanlığı pada tahun 1924 dan menempatkannya sebagai institusi resmi yang mengelola kehidupan keagamaan masyarakat. Diyanet diberi kewenangan mengangkat imam, menyusun khutbah Jumat, menerbitkan fatwa, mengembangkan pendidikan keagamaan, serta menyediakan berbagai layanan keagamaan bagi warga negara. Dengan demikian, sekularisasi di Turki tidak diwujudkan melalui penarikan negara dari urusan agama, melainkan melalui restrukturisasi otoritas keagamaan ke dalam birokrasi negara (Kuru, 2009; Kaya, 2020). Paradoks inilah yang menjadikan Turki sebagai salah satu laboratorium paling penting untuk memahami bagaimana negara modern memproduksi dan mengelola otoritas keagamaan.

Paradoks tersebut semakin menguat setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkınma Partisi*–AKP) memperoleh kekuasaan pada tahun 2002. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan AKP memperluas kapasitas kelembagaan Diyanet melalui peningkatan anggaran, jumlah personel, jaringan pelayanan, serta peran yang lebih luas dalam pembentukan wacana keagamaan nasional maupun internasional (Öztürk, 2016; Lord, 2018). Perubahan ini memperlihatkan bahwa pergantian rezim politik tidak mengurangi intervensi negara terhadap agama. Sebaliknya, negara mempertahankan institusi yang sama, tetapi mengubah orientasi penggunaannya sesuai dengan konfigurasi politik yang berkembang. Dengan kata lain, yang berubah bukan keberadaan Diyanet sebagai instrumen negara, melainkan cara negara menggunakan institusi tersebut untuk membentuk otoritas keagamaan.

Transformasi tersebut juga memengaruhi hubungan negara dengan berbagai kelompok keagamaan. Standardisasi otoritas melalui Diyanet memperkuat posisi Islam Sunni sebagai representasi resmi negara, sementara komunitas Alevi dan sejumlah kelompok keagamaan lain terus memperjuangkan pengakuan kelembagaan serta kesetaraan pelayanan publik. Pada saat yang sama, organisasi keagamaan, tarekat, dan masyarakat sipil mengembangkan strategi yang beragam, mulai dari adaptasi terhadap kebijakan negara hingga negosiasi dan resistensi terhadap berbagai bentuk standardisasi keagamaan (USCIRF, 2022; Yılmaz et al., 2023). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan negara dan agama di Turki tidak dapat dipahami sebagai relasi dominasi yang bersifat sepihak, melainkan sebagai proses yang terus dinegosiasikan oleh berbagai aktor dalam ruang publik.

Perdebatan mengenai fenomena tersebut telah melahirkan beragam kajian akademik. Casanova (1994) dan Kuru (2009) menjelaskan karakter khas sekularisme Turki sebagai

bentuk pengelolaan agama oleh negara. Kaya (2020) mengkaji posisi Diyanet dalam struktur administrasi negara, sedangkan Öztürk (2016) dan Lord (2018) menunjukkan transformasi fungsi Diyanet pada era AKP. Di bidang kajian Al-Qur'an, Gunasti (2019) dan Wilson (2014) menguraikan dinamika produksi tafsir pada masa transisi Republik, sementara berbagai penelitian lain membahas politik identitas, minoritas Alevi, serta kebijakan keagamaan kontemporer. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan perubahan kelembagaan, produksi tafsir, politik identitas, dan respons kelompok keagamaan sebagai tema-tema yang berdiri sendiri. Akibatnya, belum banyak kajian yang menjelaskan bagaimana seluruh perubahan tersebut merupakan bagian dari transformasi mekanisme kuasa negara yang bekerja secara berkelanjutan dalam membentuk, mendistribusikan, dan melegitimasi otoritas keagamaan lintas rezim politik.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menganalisis bagaimana relasi kuasa antara negara dan agama membentuk produksi otoritas keagamaan di Turki sejak era Kemalisme hingga pemerintahan AKP, serta bagaimana transformasi tersebut memengaruhi dinamika adaptasi, negosiasi, dan resistensi berbagai aktor keagamaan. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Michel Foucault, khususnya konsep *power*, *power/knowledge*, *governmentality*, *pastoral power*, dan *resistance* (Foucault, 1980; Foucault, 1991). Kerangka ini memungkinkan perubahan hubungan negara-agama dipahami bukan sebagai pertentangan sederhana antara sekularisme dan religiusitas, melainkan sebagai perubahan teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang bekerja melalui institusi, produksi pengetahuan, normalisasi, dan pembentukan subjek keagamaan.

Artikel ini berargumen bahwa kesinambungan Diyanet dari era Kemalisme hingga pemerintahan AKP tidak mencerminkan pergeseran linear dari negara sekuler menuju negara religius. Sebaliknya, keberlanjutan tersebut menunjukkan transformasi *governmentality* keagamaan, yakni perubahan orientasi mekanisme kuasa negara dalam memproduksi, mengelola, dan melegitimasi otoritas keagamaan melalui institusi yang sama. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menjelaskan hubungan negara-agama di Turki melalui dikotomi sekularisme dan Islamisme atau melalui perubahan politik antarrezim, artikel ini menawarkan pembacaan Foucauldian mengenai *religious governmentality* yang menempatkan Diyanet sebagai teknologi pemerintahan yang mempertahankan kesinambungan relasi kuasa negara lintas rezim politik. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini tidak hanya menjelaskan transformasi Diyanet sebagai institusi negara, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang memperluas kajian hubungan negara-agama melalui perspektif *governmentality*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis transformasi relasi kuasa antara negara dan agama dalam pembentukan otoritas keagamaan di Turki sejak era Kemalisme hingga pemerintahan

Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkınma Partisi*-AKP). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan menginterpretasikan bagaimana mekanisme kuasa negara diproduksi, dijalankan, dan ditransformasikan melalui institusi, kebijakan, serta wacana keagamaan yang terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis (Foucault, 1980; Creswell & Poth, 2018). Desain penelitian bersifat historis-komparatif, sehingga memungkinkan penelusuran perubahan tata kelola agama secara longitudinal serta perbandingan orientasi kebijakan antara periode Kemalisme dan pemerintahan AKP.

Korpus penelitian terdiri atas dokumen primer dan sekunder yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Dokumen primer meliputi peraturan perundang-undangan Republik Turki, publikasi resmi Diyanet İşleri Başkanlığı, laporan kelembagaan, pidato dan dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan agama. Dokumen sekunder mencakup artikel jurnal *peer-reviewed*, buku akademik, disertasi, serta kajian historis mengenai sekularisme Turki, Diyanet, politik identitas, komunitas Alevi, dan relasi negara-agama. Literatur diprioritaskan berasal dari publikasi tahun 2011–2025 untuk menjaga kemutakhiran analisis, dengan tetap memasukkan karya-karya klasik yang menjadi landasan konseptual, terutama tulisan Michel Foucault mengenai *power*, *power/knowledge*, *governmentality*, *pastoral power*, dan *resistance* (Foucault, 1980, 1991).

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, Taylor & Francis, SpringerLink, JSTOR, dan ScienceDirect, serta laman resmi Diyanet İşleri Başkanlığı dan peraturan pemerintah Turki. Kata kunci yang digunakan meliputi *Turkey*, *state-controlled secularism*, *Diyanet*, *religious authority*, *state-religion relations*, *governmentality*, *Michel Foucault*, *Alevi*, dan *AKP*, baik secara tunggal maupun dalam berbagai kombinasi. Dokumen yang diseleksi harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) membahas secara langsung hubungan negara dan agama di Turki atau transformasi Diyanet; (2) diterbitkan oleh penerbit atau jurnal akademik yang bereputasi, kecuali dokumen resmi negara; dan (3) memiliki relevansi konseptual dengan kerangka analisis penelitian. Dokumen yang hanya memuat informasi populer, opini, atau tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari korpus analisis. Penyusunan kriteria tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan proses seleksi dokumen.

Data dianalisis menggunakan qualitative content analysis yang dipadukan dengan reflective thematic analysis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola informasi, kebijakan, dan representasi otoritas keagamaan dalam dokumen, sedangkan analisis tematik reflektif digunakan untuk mengembangkan tema-tema interpretatif berdasarkan dialog antara data empiris dan kerangka teoritis (Braun & Clarke, 2021; Seddighi et al., 2021). Proses pengodean dilakukan secara deduktif dengan menjadikan konsep-konsep Michel Foucault *power*, *power/knowledge*, *governmentality*, *pastoral power*, dan *resistance* sebagai kategori analitis awal, kemudian dikembangkan secara reflektif sesuai pola yang muncul

dalam korpus dokumen. Melalui proses tersebut diperoleh tema-tema utama mengenai pembentukan Diyanet sebagai teknologi pemerintahan, standardisasi otoritas keagamaan, transformasi fungsi Diyanet pada era AKP, serta dinamika adaptasi, negosiasi, dan resistensi kelompok-kelompok keagamaan.

Untuk menjaga trustworthiness penelitian, interpretasi tidak didasarkan pada satu jenis sumber, tetapi diverifikasi melalui triangulasi sumber antara dokumen kebijakan negara, publikasi resmi Diyanet, dan literatur akademik. Selain itu, peneliti menyusun audit trail selama proses analisis untuk mendokumentasikan tahapan penelusuran, seleksi, pengodean, dan pengembangan tema sehingga konsistensi interpretasi dapat ditelusuri kembali. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan credibility, dependability, dan confirmability hasil penelitian tanpa mengabaikan karakter reflektif penelitian kualitatif berbasis dokumen (Lincoln & Guba, 1985; Braun & Clarke, 2021).

Hasil dan Pembahasan

A. Pembentukan Diyanet sebagai Teknologi Administrasi Negara

Pembentukan Diyanet İşleri Başkanlığı pada tahun 1924 merupakan salah satu kebijakan paling menentukan dalam transformasi hubungan negara dan agama di Turki modern. Reformasi yang dipimpin Mustafa Kemal Atatürk umumnya dipahami sebagai proyek sekularisasi yang bertujuan memisahkan agama dari negara. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Diyanet justru memperlihatkan pola yang berbeda. Negara tidak menarik diri dari urusan agama, melainkan membangun sebuah institusi birokratis yang memungkinkan pengelolaan kehidupan keagamaan dilakukan secara lebih terpusat, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sekularisasi di Turki tidak diwujudkan melalui penghapusan agama dari ruang publik, tetapi melalui transformasi cara negara mengatur dan mengadministrasikan otoritas keagamaan (Kuru, 2009; Kaya, 2020).

Transformasi tersebut berlangsung bersamaan dengan pembubaran institusi Kekhalifahan melalui Undang-Undang Nomor 429 Tahun 1924 yang mengakhiri otoritas politik khalifah sebagai simbol pemersatu umat Islam. Pada saat yang sama, negara mendirikan Diyanet untuk mengambil alih fungsi administrasi keagamaan yang sebelumnya dijalankan oleh struktur keulamaan Utsmaniyah. Sejak awal pembentukannya, Diyanet ditempatkan di bawah struktur eksekutif dan diberi kewenangan mengelola masjid, mengangkat imam, menyusun khutbah, memberikan bimbingan keagamaan, serta mengoordinasikan pelayanan keagamaan di seluruh wilayah Turki. Konfigurasi kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menghapus institusi agama, tetapi mentransformasikan pengelolaannya ke dalam sistem administrasi modern yang berada di bawah kendali birokrasi negara (Findley, 2010; Öztürk, 2016).

Perubahan kelembagaan ini juga menggeser sumber legitimasi otoritas keagamaan. Pada masa Kesultanan Utsmaniyah, otoritas tersebut bertumpu pada jaringan ulama, lembaga medrese, dan institusi Syaikh al-Islam yang memperoleh legitimasi melalui tradisi keilmuan Islam. Setelah berdirinya Republik, proses produksi otoritas keagamaan secara

bertahap dipindahkan ke dalam institusi negara melalui Diyanet. Akibatnya, legitimasi keagamaan tidak lagi terutama ditentukan oleh jaringan ulama tradisional, tetapi semakin bergantung pada mekanisme administratif yang mengatur rekrutmen imam, penyelenggaraan pelayanan keagamaan, serta distribusi wacana keagamaan resmi. Pergeseran ini menandai perubahan mendasar dalam cara negara membangun dan melegitimasi otoritas agama di ruang publik (Kaya, 2020; Lord, 2018).

Dalam perspektif Michel Foucault, pembentukan Diyanet dapat dipahami sebagai manifestasi *governmentality*, yaitu teknologi pemerintahan yang bekerja melalui institusi, regulasi, dan produksi pengetahuan untuk mengarahkan perilaku masyarakat (Foucault, 1991). Kekuasaan tidak beroperasi semata-mata melalui larangan atau represi, tetapi melalui mekanisme administratif yang membentuk norma, menentukan otoritas yang sah, serta mengatur praktik keberagamaan sehari-hari. Oleh karena itu, Diyanet tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelayanan publik di bidang agama, melainkan sebagai instrumen negara untuk mengorganisasi kehidupan keagamaan melalui proses normalisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam kerangka ini, birokrasi keagamaan menjadi medium yang menghubungkan tujuan politik negara dengan pembentukan subjek keagamaan yang sesuai dengan visi negara modern (Foucault, 1980; Dean, 2010).

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan Diyanet bukanlah kontradiksi terhadap proyek sekularisasi Republik Turki, melainkan bagian integral dari strategi negara dalam merekonstruksi hubungan antara negara dan agama. Negara tidak menghilangkan agama dari ruang publik, tetapi mengubah cara agama dikelola melalui institusi birokrasi yang berada di bawah kontrol politik. Dengan demikian, sejak awal Republik, Diyanet telah berfungsi sebagai teknologi *governmentality* yang memungkinkan negara mempertahankan keterlibatan aktif dalam urusan keagamaan sekaligus mengarahkan produksi otoritas keagamaan sesuai dengan orientasi politik yang berkembang. Temuan ini menjadi dasar untuk memahami bahwa perubahan yang terjadi pada periode-periode berikutnya bukan terletak pada keberadaan Diyanet sebagai institusi negara, melainkan pada perubahan orientasi penggunaan institusi tersebut dalam membentuk tata kelola agama di Turki.

Temuan pada bagian ini menunjukkan bahwa pembentukan Diyanet tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi administratif dari pembubaran Kekhalifahan Utsmaniyah. Lebih jauh, pembentukan tersebut merepresentasikan perubahan teknologi kekuasaan, yaitu pergeseran dari otoritas keagamaan yang bertumpu pada legitimasi tradisional menuju otoritas yang diproduksi melalui birokrasi negara. Dari perspektif Foucauldian, perubahan tersebut menandai lahirnya bentuk *governmentality* keagamaan, ketika negara mengelola populasi bukan dengan menyingkirkan agama, tetapi dengan menjadikannya bagian dari mekanisme pemerintahan. Pembacaan ini memperlihatkan bahwa sekularisme Turki sejak awal bukanlah proyek de-islamisasi, melainkan proyek reorganisasi otoritas keagamaan melalui institusi negara. Sintesis ini menjadi fondasi analitis bagi pembahasan berikutnya mengenai bagaimana Diyanet kemudian memproduksi dan

menstandarisasi otoritas keagamaan, serta bagaimana orientasi *governmentality* tersebut mengalami transformasi pada era AKP.

Sejalan dengan argumentasi Kuru (2009) dan Kaya (2020) yang menempatkan Diyanet terutama sebagai institusi administrasi negara dalam sistem sekularisme Turki. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi Diyanet tidak hanya terletak pada fungsi kelembagaannya, tetapi pada kemampuannya beroperasi sebagai teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang menghubungkan regulasi negara, produksi pengetahuan keagamaan, dan pembentukan subjek keagamaan. Dengan demikian, hubungan negara-agama dipahami sebagai proses produksi otoritas yang berlangsung melalui mekanisme birokrasi, bukan semata-mata melalui kontrol politik formal.

B. Produksi dan Standardisasi Otoritas Keagamaan

Keberadaan Diyanet sebagai institusi negara tidak hanya berfungsi mengoordinasikan administrasi keagamaan, tetapi juga menjadi mekanisme utama dalam memproduksi dan mendistribusikan otoritas keagamaan di Turki. Setelah pembentukan institusi tersebut, negara tidak lagi bergantung pada jaringan ulama tradisional sebagai sumber utama legitimasi keagamaan, melainkan membangun sistem birokrasi yang mengendalikan proses rekrutmen imam, penyusunan khutbah Jumat, penerbitan fatwa, pendidikan keagamaan, serta berbagai bentuk pelayanan keagamaan lainnya. Melalui mekanisme tersebut, negara memperoleh kapasitas untuk menentukan bentuk pengetahuan keagamaan yang dianggap sah sekaligus mengarahkan praktik keberagamaan masyarakat secara lebih seragam (Kaya, 2020; Öztürk, 2016).

Produksi otoritas tersebut berlangsung melalui proses standardisasi yang terintegrasi. Seluruh imam yang bertugas di masjid-masjid negara direkrut dan dibiayai oleh Diyanet, sementara materi khutbah Jumat disusun secara terpusat untuk kemudian disampaikan secara serentak di berbagai wilayah Turki. Selain itu, Diyanet menerbitkan fatwa, buku panduan keagamaan, tafsir, materi pendidikan Islam, hingga konten digital yang menjadi rujukan masyarakat dalam memahami ajaran Islam. Dengan demikian, institusi ini tidak hanya menyediakan pelayanan keagamaan, tetapi juga membangun kerangka penafsiran resmi yang menjadi acuan dalam praktik keberagamaan sehari-hari (Lord, 2018; Kaya, 2020).

Dalam perspektif Michel Foucault, mekanisme tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara kuasa dan pengetahuan (*power/knowledge*). Foucault menegaskan bahwa pengetahuan tidak pernah berdiri secara netral, melainkan selalu diproduksi melalui relasi kuasa yang menentukan apa yang dapat dikatakan sebagai kebenaran (*regime of truth*) pada suatu masyarakat (Foucault, 1980). Dalam konteks Turki, khutbah, fatwa, pendidikan agama, dan berbagai publikasi resmi Diyanet tidak hanya berfungsi menyampaikan ajaran Islam, tetapi juga membentuk batas-batas pengetahuan keagamaan yang memperoleh legitimasi negara. Produksi pengetahuan tersebut menjadikan Diyanet sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mendefinisikan interpretasi keagamaan yang dianggap otoritatif sekaligus menempatkan interpretasi lain di luar struktur resmi negara.

Proses standardisasi tersebut memiliki implikasi yang luas terhadap distribusi otoritas keagamaan. Ketika negara memusatkan produksi wacana melalui satu institusi, ruang bagi otoritas alternatif menjadi semakin terbatas. Kelompok-kelompok keagamaan yang berada di luar struktur resmi, termasuk sebagian tarekat dan komunitas Alevi, tidak selalu memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya kelembagaan maupun pengakuan negara. Kondisi ini tidak berarti bahwa keberadaan mereka dihapuskan, tetapi menunjukkan bahwa legitimasi institusional lebih banyak diberikan kepada bentuk keberagamaan yang selaras dengan kerangka administrasi Diyanet. Dengan demikian, standardisasi bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme politik yang menentukan distribusi legitimasi keagamaan dalam ruang publik (Yılmaz et al., 2023; USCIRF, 2022).

Meskipun demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa standardisasi tidak pernah menghasilkan keseragaman secara absolut. Berbagai aktor keagamaan tetap mengembangkan ruang interpretasi, jaringan pendidikan, dan otoritas sosial di luar struktur resmi negara. Fakta ini menunjukkan bahwa produksi pengetahuan oleh negara selalu berhadapan dengan keberagaman praktik keagamaan yang terus berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dominasi Diyanet lebih tepat dipahami sebagai proses yang terus diproduksi dan dipertahankan melalui institusi, bukan sebagai bentuk kontrol yang sepenuhnya meniadakan otoritas keagamaan lain.

Bagian ini memperlihatkan bahwa fungsi utama Diyanet tidak hanya terletak pada administrasi pelayanan keagamaan, tetapi juga pada kemampuannya membangun **rezim** pengetahuan keagamaan yang memperoleh legitimasi melalui negara. Dalam kerangka *power/knowledge*, negara tidak mengendalikan masyarakat semata-mata melalui regulasi hukum, melainkan melalui produksi pengetahuan yang membentuk cara masyarakat memahami agama, memilih otoritas yang sah, dan mempraktikkan kehidupan keagamaannya. Dengan demikian, kekuasaan bekerja secara produktif dengan menciptakan standar, norma, dan bentuk legitimasi baru yang kemudian diterima sebagai bagian dari tatanan sosial.

Temuan ini sejalan dengan Lord (2018), tetapi memberikan penekanan yang lebih kuat pada mekanisme *power/knowledge* dalam menjelaskan ekspansi kelembagaan Diyanet. Artikel ini menunjukkan bahwa perluasan kelembagaan tersebut pada dasarnya merupakan mekanisme produksi *regime of truth*, yakni proses ketika negara tidak hanya mengelola institusi agama, tetapi juga menentukan bentuk pengetahuan keagamaan yang memperoleh legitimasi dalam ruang publik. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari persoalan kelembagaan menuju mekanisme produksi otoritas melalui relasi antara kuasa dan pengetahuan.

C. Transformasi Governmentality Keagamaan pada Era AKP

Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkınma Partisi*-AKP) pada tahun 2002 menandai perubahan penting dalam konfigurasi politik Turki. Pergeseran

tersebut sering dipahami sebagai titik balik dari sekularisme Kemalis menuju meningkatnya peran agama dalam ruang publik. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak menghilangkan mekanisme pengelolaan agama yang telah dibangun sejak awal Republik. Sebaliknya, pemerintahan AKP mempertahankan keberadaan Diyanet sebagai institusi utama negara dalam mengelola kehidupan keagamaan, sekaligus memperluas fungsi dan kapasitasnya sesuai dengan orientasi politik pemerintahan yang baru (Öztürk, 2016; Lord, 2018).

Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya anggaran, jumlah personel, cakupan pelayanan, serta perluasan aktivitas Diyanet di bidang pendidikan, pelayanan sosial, media, keluarga, dan hubungan internasional. Diyanet tidak lagi diposisikan semata sebagai lembaga administrasi keagamaan yang menjaga batas-batas sekularisme republik, tetapi berkembang menjadi institusi yang berperan aktif dalam pembentukan wacana moral, identitas nasional, dan diplomasi keagamaan Turki. Perluasan fungsi tersebut menunjukkan bahwa negara tetap menjadikan Diyanet sebagai instrumen strategis dalam menghubungkan kebijakan publik dengan kehidupan keagamaan masyarakat (Lord, 2018; Yılmaz, Shukri, & Shakil, 2023).

Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa yang mengalami perubahan bukanlah struktur dasar hubungan antara negara dan agama, melainkan orientasi penggunaan institusi negara. Pada masa Kemalisme, Diyanet berfungsi menjaga stabilitas negara melalui pengendalian agama agar selaras dengan proyek sekularisasi republik. Sebaliknya, pada era AKP institusi yang sama digunakan untuk memperkuat representasi Islam-konservatif dalam ruang publik, memperluas pelayanan keagamaan, dan membangun legitimasi politik melalui penguatan identitas religius masyarakat. Dengan demikian, perubahan rezim tidak menghapus mekanisme pengelolaan agama oleh negara, tetapi mengubah arah serta tujuan politik yang ingin dicapai melalui institusi tersebut (Öztürk, 2016; Kaya, 2020).

Dalam perspektif Michel Foucault, fenomena tersebut menunjukkan bahwa *governmentality* bukanlah seperangkat kebijakan yang bersifat statis, melainkan teknologi pemerintahan yang dapat beradaptasi dengan perubahan konfigurasi kekuasaan tanpa harus mengubah perangkat institusionalnya (Foucault, 1991). Institusi yang sama dapat menghasilkan orientasi pemerintahan yang berbeda ketika tujuan politik, strategi legitimasi, dan bentuk rasionalitas pemerintahannya mengalami perubahan. Oleh karena itu, keberlanjutan Diyanet dari era Kemalisme hingga AKP memperlihatkan bahwa kesinambungan institusi tidak selalu berarti kesinambungan orientasi politik. Sebaliknya, perubahan orientasi tersebut justru menunjukkan fleksibilitas *governmentality* dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan rezim yang sedang berkuasa.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perluasan peran Diyanet pada era AKP tidak hanya berlangsung di tingkat domestik, tetapi juga pada ranah internasional. Melalui jaringan masjid, lembaga pendidikan, bantuan kemanusiaan, serta pelayanan bagi diaspora Turki di berbagai negara, Diyanet semakin berfungsi sebagai instrumen diplomasi publik yang membawa kepentingan negara ke ruang transnasional. Dalam konteks ini, pengelolaan

agama tidak lagi terbatas pada administrasi keagamaan nasional, tetapi berkembang menjadi bagian dari strategi negara dalam membangun pengaruh politik dan budaya di tingkat global (Lord, 2018). Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi Diyanet terus mengalami ekspansi tanpa kehilangan karakter utamanya sebagai institusi negara yang memproduksi dan mengelola otoritas keagamaan.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa transformasi hubungan negara dan agama di Turki tidak dapat dijelaskan melalui dikotomi sederhana antara negara sekuler dan negara religius. Pergantian rezim memang menghasilkan perubahan orientasi kebijakan keagamaan, tetapi perubahan tersebut berlangsung melalui institusi birokrasi yang tetap dipertahankan. Dengan demikian, kesinambungan Diyanet menjadi indikator bahwa negara, baik pada era Kemalisme maupun AKP, tetap memandang pengelolaan agama sebagai bagian dari strategi pemerintahan. Perbedaannya terletak pada rasionalitas politik yang mengarahkan penggunaan institusi tersebut dalam setiap periode pemerintahan.

Bagian ini menunjukkan bahwa perubahan paling mendasar pada era AKP bukanlah meningkatnya intervensi negara terhadap agama, karena intervensi tersebut telah berlangsung sejak awal Republik, melainkan berubahnya orientasi *governmentality* keagamaan yang dijalankan melalui Diyanet. Jika pada era Kemalisme institusi ini diarahkan untuk mendisiplinkan agama agar selaras dengan proyek sekularisme negara, maka pada era AKP Diyanet digunakan untuk memperluas representasi Islam-konservatif sebagai bagian dari pembentukan identitas nasional dan legitimasi politik. Dengan demikian, perubahan rezim di Turki lebih tepat dipahami sebagai transformasi rasionalitas pemerintahan, bukan sebagai peralihan linear dari negara sekuler menuju negara religius.

Temuan ini memperlihatkan bahwa perubahan politik tidak selalu identik dengan perubahan teknologi pemerintahan. Sebaliknya, kesinambungan institusi memungkinkan negara mempertahankan relasi kuasa melalui rasionalitas pemerintahan yang berbeda pada setiap rezim. Oleh karena itu, perubahan dari Kemalisme menuju AKP lebih tepat dipahami sebagai transformasi orientasi *governmentality* daripada sebagai pergeseran dari negara sekuler menuju negara religius.

D. Negosiasi dan Resistensi terhadap Otoritas Keagamaan Negara

Meskipun Diyanet berhasil membangun sistem administrasi keagamaan yang terpusat dan memperoleh legitimasi sebagai institusi resmi negara, penelitian ini menunjukkan bahwa dominasi tersebut tidak pernah sepenuhnya meniadakan keberadaan otoritas keagamaan alternatif. Di berbagai periode perkembangan Republik Turki, sejumlah komunitas keagamaan tetap mempertahankan praktik, jaringan, dan tradisi keagamaannya di luar struktur resmi negara. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pengelolaan agama melalui birokrasi negara selalu diiringi oleh proses negosiasi dan resistensi yang membentuk dinamika hubungan antara negara dan masyarakat (Lord, 2018; Yılmaz et al., 2023).

Salah satu bentuk resistensi yang paling menonjol berasal dari komunitas Alevi, yang sejak lama mengkritik posisi Diyanet karena dianggap lebih merepresentasikan tradisi Islam

Sunni dibandingkan keragaman ekspresi keagamaan di Turki. Komunitas Alevi secara konsisten menuntut pengakuan terhadap *cemevi* sebagai tempat ibadah, distribusi pelayanan publik yang lebih setara, serta reformasi kelembagaan yang mampu mengakomodasi pluralitas agama dan keyakinan. Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata keberadaan Diyanet, melainkan bagaimana negara mendistribusikan legitimasi keagamaan melalui institusi tersebut (USCIRF, 2022; Kaya, 2020).

Selain komunitas Alevi, berbagai tarekat (*tarikât*) dan jaringan keagamaan juga terus mempertahankan ruang otoritas sosial yang relatif otonom dari birokrasi negara. Meskipun beberapa organisasi pernah mengalami pembatasan pada masa awal Republik, jaringan pendidikan, kegiatan sosial, filantropi, dan dakwah tetap berkembang melalui mekanisme masyarakat sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan tidak hanya diproduksi oleh negara, tetapi juga terus dibangun melalui relasi sosial, tradisi keilmuan, dan jaringan komunitas yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Dengan demikian, ruang keagamaan di Turki selalu diwarnai oleh interaksi antara otoritas resmi negara dan berbagai bentuk otoritas sosial yang berkembang di luar struktur birokrasi (Lord, 2018; Öztürk, 2016).

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan aktor-aktor keagamaan lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi yang terus berlangsung daripada sebagai relasi dominasi yang bersifat absolut. Dalam praktiknya, negara memang memiliki kapasitas untuk mengatur institusi, sumber daya, dan distribusi legitimasi keagamaan melalui Diyanet. Namun, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menafsirkan, menyesuaikan, bahkan mempertahankan praktik keagamaan yang tidak selalu identik dengan wacana resmi negara. Oleh karena itu, keberlangsungan otoritas keagamaan di Turki merupakan hasil interaksi yang dinamis antara regulasi negara dan partisipasi masyarakat dalam membentuk kehidupan keagamaan.

Perspektif Michel Foucault membantu menjelaskan dinamika tersebut melalui konsep *resistance*. Bagi Foucault, kekuasaan tidak pernah bekerja secara sepihak, melainkan selalu melahirkan kemungkinan respons, adaptasi, dan perlawanan dari subjek yang berada dalam relasi kuasa (Foucault, 1980). Resistensi bukanlah sesuatu yang berada di luar kekuasaan, tetapi merupakan bagian inheren dari cara kerja kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks Turki, keberadaan komunitas Alevi, tarekat, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai bentuk otoritas keagamaan non-negara memperlihatkan bahwa produksi otoritas melalui Diyanet senantiasa berhadapan dengan praktik-praktik sosial yang menawarkan sumber legitimasi alternatif. Dengan demikian, relasi antara negara dan agama tidak pernah bersifat final, melainkan terus diproduksi melalui proses negosiasi yang berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Foucauldian, keberadaan berbagai bentuk resistensi tersebut justru menegaskan bahwa kekuasaan tidak pernah bekerja secara absolut. Resistensi bukanlah antitesis kekuasaan, melainkan bagian inheren dari relasi kuasa yang memungkinkan berlangsungnya proses negosiasi secara terus-menerus. Dengan demikian, dinamika antara negara, Diyanet, dan berbagai komunitas keagamaan menunjukkan produktivitas

governmentality dalam membentuk sekaligus memunculkan berbagai bentuk respons sosial terhadap otoritas negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas *governmentality* keagamaan tidak ditentukan oleh kemampuan negara untuk menghilangkan seluruh bentuk otoritas alternatif, tetapi oleh kemampuannya mengelola keberagaman tersebut melalui kombinasi regulasi, legitimasi, dan institusionalisasi. Negara memang berhasil menjadikan Diyanet sebagai pusat administrasi dan produksi otoritas keagamaan, tetapi legitimasi keagamaan di tingkat masyarakat tetap terbentuk melalui interaksi dengan berbagai aktor sosial yang memiliki basis kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itu, hubungan negara-agama di Turki lebih tepat dipahami sebagai arena yang terus mempertemukan dominasi, negosiasi, dan resistensi dalam satu proses yang saling membentuk.

E. Rekoneptualisasi Governmentality Keagamaan dalam Relasi Negara–Agama di Turki

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan agama di Turki tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui dikotomi antara sekularisme dan religiusitas. Pendekatan tersebut cenderung memandang perubahan politik sebagai pergeseran linear dari dominasi negara sekuler menuju meningkatnya pengaruh agama dalam ruang publik. Analisis terhadap perkembangan Diyanet sejak awal Republik hingga era AKP memperlihatkan pola yang berbeda. Perubahan yang terjadi bukanlah perpindahan dari absennya negara menuju hadirnya negara dalam urusan agama, melainkan transformasi rasionalitas pemerintahan yang menggunakan institusi yang sama untuk mencapai tujuan politik yang berbeda pada setiap periode sejarah.

Kajian ini menunjukkan bahwa Diyanet merupakan bentuk *governmentality* keagamaan, yaitu teknologi pemerintahan yang memungkinkan negara mengelola kehidupan keagamaan melalui institusi birokrasi, produksi pengetahuan, serta distribusi legitimasi keagamaan. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya mengatur agama melalui regulasi formal, tetapi juga melalui mekanisme yang membentuk cara masyarakat memahami ajaran agama, memilih otoritas yang sah, dan mempraktikkan kehidupan keagamaannya. Dengan demikian, agama tidak ditempatkan di luar struktur negara, melainkan menjadi bagian dari perangkat pemerintahan yang bekerja melalui pembentukan norma, disiplin sosial, dan produksi kebenaran (*regime of truth*) sebagaimana dijelaskan oleh Michel Foucault (Foucault, 1980; Foucault, 1991).

Dari perspektif tersebut, kesinambungan Diyanet sejak era Kemalisme hingga pemerintahan AKP menunjukkan bahwa perubahan rezim politik tidak selalu menghasilkan perubahan terhadap teknologi pemerintahan yang digunakan negara. Sebaliknya, institusi yang sama dapat menjalankan orientasi politik yang berbeda sesuai dengan rasionalitas pemerintahan yang berkembang. Pada masa Kemalisme, Diyanet diarahkan untuk mengintegrasikan agama ke dalam proyek negara sekuler melalui kontrol administratif terhadap kehidupan keagamaan. Sementara itu, pada era AKP institusi yang sama

dimanfaatkan untuk memperluas representasi Islam-konservatif dalam ruang publik, memperkuat identitas nasional, dan mendukung diplomasi keagamaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesinambungan institusi justru menjadi prasyarat bagi fleksibilitas *governmentality* dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan orientasi politik.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa efektivitas *governmentality* keagamaan tidak hanya bergantung pada kapasitas negara dalam membangun institusi, tetapi juga pada kemampuannya memproduksi pengetahuan dan memperoleh legitimasi sosial. Diyanet mempertahankan otoritasnya bukan semata-mata karena memiliki kewenangan administratif, tetapi karena berhasil membangun standar pengetahuan keagamaan yang diterima sebagai rujukan resmi oleh sebagian besar masyarakat. Pada saat yang sama, keberadaan komunitas Alevi, tarekat, dan berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa produksi otoritas negara selalu dihadapkan pada proses negosiasi dan resistensi. Oleh sebab itu, relasi negara–agama di Turki lebih tepat dipahami sebagai arena yang terus mempertemukan dominasi, legitimasi, adaptasi, dan resistensi dalam proses yang berlangsung secara dinamis.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, artikel ini mengajukan argumentasi bahwa *governmentality* keagamaan merupakan kerangka analitis yang lebih memadai untuk menjelaskan hubungan negara dan agama dibandingkan pendekatan yang semata-mata bertumpu pada dikotomi sekularisme–religiusitas. Konsep ini menempatkan agama sebagai objek sekaligus instrumen pemerintahan yang terus diproduksi melalui institusi, pengetahuan, dan legitimasi sosial. Dengan demikian, perubahan politik tidak selalu mengubah struktur dasar relasi negara–agama, tetapi lebih sering mengubah rasionalitas yang mengarahkan penggunaan institusi tersebut.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan pembacaan Foucauldian mengenai hubungan negara dan agama melalui konsep *governmentality* keagamaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memusatkan perhatian pada pertentangan antara sekularisme Kemalis dan konservatisme Islam pada era AKP, penelitian ini menunjukkan bahwa kedua periode tersebut memiliki kesinambungan dalam penggunaan Diyanet sebagai instrumen pengelolaan agama oleh negara. Perbedaan di antara keduanya bukan terletak pada keberadaan institusi, melainkan pada perubahan rasionalitas politik yang membentuk arah produksi otoritas keagamaan. Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana negara modern mengelola agama melalui birokrasi tanpa harus menempatkan sekularisme dan religiusitas sebagai dua kategori yang saling meniadakan.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengajukan konsep *religious governmentality* sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan negara–agama dalam konteks negara modern yang mengelola agama melalui birokrasi. Konsep ini menunjukkan bahwa agama bukan sekadar objek regulasi negara, melainkan juga instrumen pemerintahan yang digunakan untuk membentuk norma, legitimasi, dan identitas sosial melalui institusi resmi. Kerangka ini tidak hanya relevan untuk menjelaskan pengalaman Turki, tetapi juga

berpotensi diterapkan dalam kajian negara-negara lain yang mengembangkan birokrasi keagamaan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Temuan ini juga memperkuat perkembangan kajian mutakhir mengenai birokrasi Islam yang menempatkan institusi keagamaan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola negara, sebagaimana diperlihatkan dalam studi komparatif antara Diyanet Turki dan Kementerian Agama Indonesia (Nasruddin, 2025).

Untuk memperjelas sintesis temuan penelitian, model konseptual yang diusulkan dalam artikel ini disajikan pada Figure 1 dibawah ini:

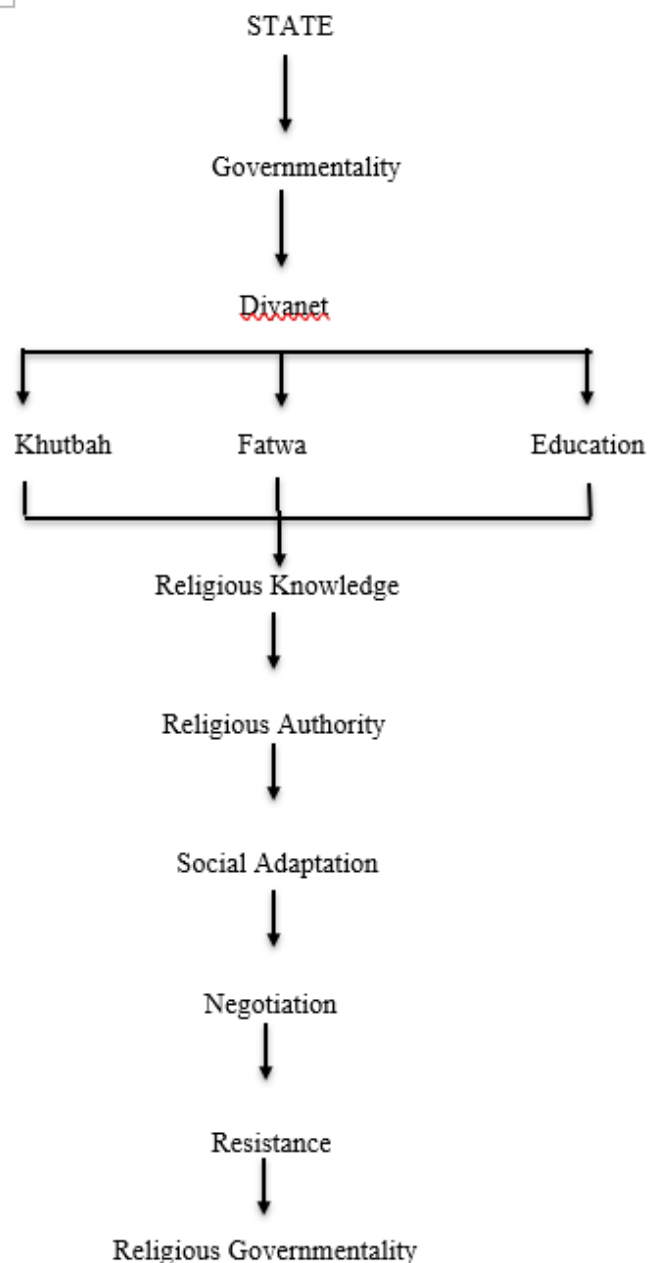


Figure 1. Religious Governmentality Model in State-Religion Relations in Turkey

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan temuan penelitian (2026).

Figure 1 merangkum sintesis temuan penelitian mengenai dinamika hubungan negara dan agama di Turki melalui perspektif *religious governmentality*. Model tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan aktor utama yang membentuk rasionalitas pemerintahan (*governmentality*) dalam mengelola agama melalui institusi resmi, yaitu Diyanet İşleri Başkanlığı. Dalam kerangka ini, Diyanet tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis negara dalam memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan keagamaan melalui khutbah, fatwa, pendidikan keagamaan, serta pembinaan imam. Proses tersebut menghasilkan standardisasi otoritas keagamaan yang membentuk norma, praktik, dan legitimasi keagamaan dalam ruang publik.

Model ini juga memperlihatkan bahwa produksi otoritas keagamaan tidak berhenti pada proses regulasi, melainkan menghasilkan beragam respons sosial. Sebagian masyarakat menerima dan menginternalisasi otoritas yang dibangun negara sebagai bentuk adaptasi terhadap norma resmi, sementara kelompok lain melakukan negosiasi maupun resistensi terhadap bentuk-bentuk otoritas tersebut. Dengan demikian, resistensi dipahami bukan sebagai kegagalan pemerintah dalam mengendalikan agama, tetapi sebagai bagian yang inheren dari relasi kuasa sebagaimana dijelaskan dalam perspektif Foucauldian. Interaksi antara produksi otoritas, adaptasi sosial, negosiasi, dan resistensi inilah yang membentuk dinamika *religious governmentality* secara berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengajukan *religious governmentality* sebagai model analitis untuk menjelaskan hubungan negara-agama yang melampaui dikotomi sekularisme dan Islamisme. Model ini menunjukkan bahwa kesinambungan relasi negara-agama tidak semata-mata ditentukan oleh perubahan rezim politik, melainkan oleh transformasi rasionalitas pemerintahan dalam memproduksi, mengelola, dan melegitimasi otoritas keagamaan melalui institusi negara. Oleh karena itu, model ini berpotensi digunakan sebagai kerangka konseptual dalam penelitian komparatif mengenai birokrasi keagamaan di negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi negara dan agama di Turki tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi antara sekularisme dan religiusitas. Analisis terhadap perkembangan Diyanet İşleri Başkanlığı sejak pembentukannya pada tahun 1924 hingga pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkınma Partisi*-AKP) memperlihatkan bahwa negara secara konsisten mempertahankan keterlibatannya dalam pengelolaan kehidupan keagamaan melalui institusi birokrasi yang terpusat. Dengan menggunakan perspektif *governmentality* Michel Foucault, penelitian ini menemukan bahwa Diyanet bukan sekadar lembaga administrasi keagamaan, tetapi merupakan teknologi pemerintahan yang memungkinkan negara memproduksi, mendistribusikan, dan melegitimasi otoritas keagamaan melalui mekanisme birokrasi, regulasi, dan produksi pengetahuan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan politik dari era Kemalisme menuju pemerintahan AKP tidak mengubah struktur dasar hubungan negara dan agama di Turki. Kesenambungan Diyanet sebagai institusi negara menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai transformasi rasionalitas pemerintahan (*governmental rationality*) daripada perubahan institusional. Pada masa Kemalisme, Diyanet digunakan untuk mengintegrasikan agama ke dalam proyek sekularisme negara melalui pengendalian administratif terhadap kehidupan keagamaan. Sebaliknya, pada era AKP institusi yang sama dimanfaatkan untuk memperluas representasi Islam-konservatif, memperkuat identitas nasional, dan mendukung diplomasi keagamaan. Dengan demikian, yang berubah bukanlah keberadaan institusi, melainkan orientasi politik yang mengarahkan penggunaannya.

Penelitian ini selanjutnya memperlihatkan bahwa efektivitas *governmentality* keagamaan dibangun melalui relasi antara institusi, produksi pengetahuan, dan legitimasi sosial. Diyanet menjalankan fungsi tersebut melalui standardisasi khutbah, pengangkatan imam, penerbitan fatwa, pendidikan keagamaan, serta berbagai bentuk pelayanan publik yang membentuk *regime of truth* dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Namun demikian, dominasi tersebut tidak pernah bersifat absolut. Kehadiran komunitas Alevi, tarekat, serta berbagai aktor masyarakat sipil menunjukkan bahwa relasi kuasa selalu melahirkan ruang negosiasi dan resistensi. Temuan ini menguatkan pandangan Foucault bahwa kekuasaan tidak bekerja secara sepihak, tetapi senantiasa diproduksi melalui hubungan yang dinamis antara dominasi, legitimasi, adaptasi, dan resistensi.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pengajuan konsep *governmentality* keagamaan sebagai kerangka analitis untuk memahami hubungan negara dan agama di Turki. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan Kemalisme dan AKP sebagai dua rezim yang saling berlawanan, penelitian ini menunjukkan adanya kesinambungan dalam penggunaan Diyanet sebagai instrumen pengelolaan agama oleh negara, sementara perbedaan di antara keduanya terletak pada perubahan rasionalitas politik yang membentuk arah produksi otoritas keagamaan. Dengan demikian, artikel ini memperluas penerapan perspektif Foucauldian dalam studi hubungan negara-agama sekaligus menawarkan model analitis yang berpotensi digunakan untuk menjelaskan praktik pengelolaan agama di negara lain yang mengembangkan birokrasi keagamaan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis dokumen dan dinamika kelembagaan Diyanet sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam pengalaman komunitas keagamaan di tingkat lokal maupun persepsi masyarakat terhadap kebijakan negara. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa keberlangsungan relasi negara-agama lebih ditentukan oleh perubahan rasionalitas pemerintahan daripada oleh perubahan rezim politik semata. Perspektif *religious governmentality* yang diajukan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi hubungan negara-agama sekaligus

membuka ruang bagi pengembangan analisis komparatif mengenai tata kelola agama di berbagai negara modern.

Referensi

- Azak, U. (2010). *Islam and secularism in Turkey: Kemalism, religion and the nation state*. I.B. Tauris.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Cündioğlu, D. (1999). *Bir siyasi proje olarak Türkçe ibadet I*. Kitabevi.
- Cündioğlu, D. (2005). *Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e din ve siyaset*. Kaknüs.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). SAGE.
- Dikici, A. (2010). İbadet dilinin Türkçeleştirilmesi bağlamında Türkçe ezan denemesi ve buna gösterilen tepkiler. *İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi*, 10, 71-90.
- Findley, C. V. (2010). *Turkey, Islam, nationalism, and modernity: A history*. Yale University Press.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- Gunasti, S. (2019). *The Qur'an between the Ottoman Empire and the Turkish Republic: An exegetical tradition*. Routledge.
- Kaya, E. (2020). *Secularism and state religion in modern Turkey: Law, policy making and the Diyanet*. Edinburgh University Press.
- Kuru, A. T. (2009). *Secularism and state policies toward religion: The United States, France, and Turkey*. Cambridge University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Lord, C. (2018). *Religious politics in Turkey: From the birth of the republic to the AKP*. Cambridge University Press.
- Musthafa, A. K., & Purwati, H. (2022). Sejarah dan transformasi politik Turki: Pergulatan sekularisme dan Islamisme. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 10(1), 1025-1040.
- Nasruddin, R. (2025). *Islamic bureaucracies in Indonesia and Turkey: The challenge of comparison*.
- Öztürk, A. E. (2016). Turkey's Diyanet under AKP rule: From protector to imposer of state ideology? *Southeast European and Black Sea Studies*, 16(4), 619-635.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed

- method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544.
- Seddighi, H., Yousefzadeh, S., & López López, M. (2021). Qualitative content analysis as a research method to investigate hazards information in school textbooks. *MethodsX*, 8, Article 101559.
- United States Commission on International Religious Freedom. (2022). *The Alevi struggle for rights in Turkey*. <https://www.uscifr.gov>
- Wilson, M. B. (2014). *Translating the Qur'an in an age of nationalism: Print culture and modern Islam in Turkey*. Oxford University Press.
- Yılmaz, İ., Shukri, S., & Shakil, K. (2023). The others of Islamist civilizational populism in AKP's Turkey. *Populism & Politics*. <https://doi.org/10.55271/pp0018>